



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Nomor *210* Tahun 1983

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PAMERAN PEMBANGUNAN
DAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 1983 KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

: Bahwa untuk mensukseskan penyelenggaraan Peringatan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983 dan Pelaksanaan Pameran Pembangunan yang bertemakan " DENGAN MEMASYARAKATKAN HASIL-HASIL SIDANG UMUM MPR 1983 DAN MENSUKSESKAN PANCA KRIDA KABI - NET PEMBANGUNAN IV KITA TINGKATKAN PELAKSANAAN PELITA III " maka dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana tersebut dengan Surat Keputusan Bupati.

MENINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
3. Instruksi Direktorat Jenderal Penerangan Umum tanggal 2 Juli 1983 Nomor 22/Instr/Dirjen Penum/83 ;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 tahun 1983 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1983 / 1984.

MEMPERHATIKAN

: Radiogram Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1983 Nomor: 487/1/7048/SJ, tentang Pameran Pembangunan dan Pameran Keliling Kecamatan.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Membentuk Panitia Pelaksana ~~Pameran Pembangunan~~ dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan dengan susunan keanggotaan sebagai tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

F dan Pameran Pembangunan

- KEDUA : Menugaskan kepada Panitia dimaksud diktum PERTAMA untuk melaksanakan Pameran Pembangunan dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983 yang bertema " DENGAN MEMASYARAKATKAN HASIL-HASIL-SIDANG UMUM MPR 1983 DAN MENSUKSESKAN PANCA KRIDA KABINET PEMBANGUNAN IV KITA TINGKATKAN PELAKSANAAN PELITA III " dan dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober sampai dengan 2 Oktober 1983.
- KETIGA : Semua Instansi/Dinas/Jawatan dan Organisasi Wanita yang ditunjuk sebagai pelaksana atau penyelenggara Pameran wajib ikut serta melaksanakan atau menyelenggarakan pameran sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- KEEMPAT : Semua Panitia Pelaksana Pameran Pembangunan dan Hari Kesaktian Pancasila dimaksud atau penyelenggaraan bertanggungjawab kepada Bupati/Kepala Daerah Tingkat II Lamongan.
- KELIMA : Segala biaya pelaksanaan Pameran Pembangunan dan Hari Kesaktian Pancasila dimaksud diktum KEDUA dibebankan kepada :
1. Pembiayaan yang diperoleh dari Departemen Penerangan Republik Indonesia ;
 2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan tahun 1983/1984;
 3. Masing-masing Instansi/Dinas/Jawatan/Organisasi Wanita yang bersangkutan.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di hari kemudian terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal

: 19 September 1983.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

LAMONGAN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

Drs. PRAJITNO Mwk
NIP 010014542

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 3. Sdr. Para Kepala Dinas/Bagian/Subag dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 4. Sdr. Para Anggota Panitia Pelaksana Pameran Pembangunan dan Hari Kesaktian Pancasila 1 Oktober 1983.

LAMPIRAN Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan

Nomor

: 210 Tahun 1983

Tanggal

: 19 September 1983

SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PAMERAN PEMBANGUNAN
DAN HARI KESAKTIAN PANCASILA 1 OKTOBER 1983 -
DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NO !	N A M A	! KEDUDUKAN DALAM PANITIA !	KETERANGAN
1.	-	Pelindung/Penasehat	- MUSPIDA Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan. - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
2.	-	Pengawas	- Inspektorat Wilayah Kabupaten-Daerah Tingkat II Lamongan. - Kantor Sosial Politik Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	SOEDARSO	Ketua I	Kepala Kantor Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
	- Drs. S. GOETOMO	Ketua II	Kepala Departemen P & K Kabupaten Lamongan.
4.	A S J I K	Sekretaris	Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
	- M O E N I R		Staf Bagian Umum Humas dan Protokol.
5.	Ny. SRI RAWAT	Bendahara	Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
6.	Drs. SUPYAN ALI AS	Seksi Peragaan/Pameran	Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
	- NGOEDIONO		Kepala Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
	Ir. SOEKARDI		Kepala Dinas Pertanian Kabupaten-Lamongan.
	- ABD. K A M I D		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
7.	Drs. SOEMAEI	Seksi lomba Krida/sayembara	Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Tingkat II Lamongan.
	- SOENARSO		Kepala Dinas Perkebunan Lamongan.
	- SOEMARNO		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
	- SOEDARWO		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
8.	ATMADI SOERJOKOENTJORO	Seksi Pertunjukan Rakyat.	Kantor Cabang Dinas P dan K Daerah Tingkat II Lamongan.
	- SOEWARNO		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
	- SAMPOERI		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.

1	2	3	4
9.-	NGOEDIONO	Seksi Sarasehan/Loka Karya.	Kepala Pembangunan Desa Kabupaten Lamongan.
-	MINTRAN		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
10.-	HARI SOEHARDJO, BA	Seksi Bazar	Kepala Bagian Umum Humas dan Protokol Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-	NY. I S K A K		<i>Koordinator Dharma</i> Organisasi Wanita Ngimbang.
11.-	SADIG COKOSOEDARMO	Seksi Perlengkapan	Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lamongan.
-	KOESWORO		Kepala PLN Lamongan.
12.-	Kapten HARNOWO	Seksi Keamanan	Kores 1063 Lamongan.
-	Mayor SOEROTO		Kepala Mail Hansip 11/12 Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-	MACHFOED		Bagian Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
13.-	EDDY KOESWANDI	Seksi Publikasi	Kepala Sub Bagian Humas dan Protokol.
-	PA. DJALAL		Staf Bagian Humas dan Protokol Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-	KASMADI		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
14.	dr. ISMOEHADI	Seksi Kesehatan	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.
15.-	OESNADI ANTO ANZA, SH	Seksi Upacara	Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan.
-	SOEMARNO		Staf Departemen Penerangan Kabupaten Lamongan.
-	IMAM SOEBAGYO		Staf Bagian Umum Humas dan Protokol.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. PRAJITNO Mwk
NIP 010014542

15

Registrasi No. :

PANGGILAN	JENIS	NOMOR	DERAJAT
DARI : MENDAGRI TTK			
UNTUK : GUBERNUR KDH TK I SE INDONESIA TTK			
TEMBUSAN : BUL DAN WLKODYA SE INDONESIA DIRJEN PENUM DEPEEN TTK			

Tanggal / Waktu : 0804-1400

Jumlah perkataan :

KLASIFIKASI

BP. SEKWUDA

NOMOR : 487/1/7048/SJ TGL 1 AGUSTUS 1983 TTK

KAB. Q. I.

Alta :
Dipang 25 buku
untuk jefen
f. 090883.
AAA. SEHUBUNGAN SURAT DIRJEN PENUM NO. 22/INST/DIRJEN
PENUM 1983 KMA TENTANG PAMERAN PEMBANGUNAN DAN PA
MERAN KELILING KEC KMA DIINSTRUKSIKAN KEPADA SDR.
HAL-S SBB TTK DUA

AAA. 1. MEMBANTU TERSELENGGARANYA PAMERAN TSB TTK

AAA. 2. MENGEMPAH MASYARAKAT UNTUK MENGAPDIKAN-
PAMERAN TTK

BBB. U M P TTK HBS (X)

N I H I L

[Handwritten signature and initials]

Pengirim :	No. Kode	Waktu	Lalu Lintas	Parap Operator
Nama :		Terima	Kirim	
Jabatan :		0806	X	JURAD M. DJM.
Tanda tangan :		0945	X	JUTIK DJK.



DEPARTEMEN PENERANGAN
REPUBLIK INDONESIA

I N S T R U K S I

DIREKTUR JENDERAL PENERANGAN UMUM

No. : 22 /Instr/DirjenPenum/83

t e n t a n g

PENYELENGGARAAN PAMERAN PEMBANGUNAN DAN HARI PROKLAMASI KEMER-
DEKAAN, PAMERAN PEMBANGUNAN DAN HAPSAK PANCASILA SERTA PAMERAN
KELILING KECAMATAN TAHUN 1983/1984

MENIMBANG

- : a. Bahwa Pameran Pembangunan merupakan sarana penerangan terpadu yang memungkinkan masyarakat dapat menyaksikan secara visual-
dan langsung mengenal kegiatan pembangunan yang dilaksanakan oleh segenap Departemen/Instansi Pemerintah/Swasta maupun masyarakat.
- b. Bahwa melalui Pameran Pembangunan masyarakat dapat lebih me-
mahami, menyadari tentang Pembangunan serta perlunya dukungan dan keikut-sertaan masyarakat bagi keberhasilan Pelaksanaan -
Pembangunan.
- c. Bahwa sambil menunggu Instruksi Menteri Penerangan RI menge-
nai penyelenggaraan Pameran Pembangunan tahun 1983/1984, untuk Penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hari Proklamasi Kemer-
dekaan, Pameran Pembangunan dan Hapsak Pancasila serta Pameran Keliling Kecamatan tahun 1983 perlu dikeluarkan Instruksi Di-
rektur Jenderal Penerangan Umum.

MENGINGAT

- : 1. Keputusan Presiden RI No.44 jo 45 tahun 1974 sebagaimana telah
diubah dan ditambah.
- 2. Keputusan Presiden RI No.45/M tahun 1983.
- 3. Surat Keputusan Menteri Penerangan RI No.55A jo 55B/Kep/Menpen
/1975.

MENGINSTRUKSIKAN :

K E P A D A

- : 1. Direktur Pameran
- 2. Direktur Penerangan Daerah
- 3. Direktur Penerangan Rakyat
- 4. Direktur Pembinaan Humas
- 5. Direktur Pelayanan Penerangan Luar Negeri

6. Sekretaris Ditjen Penerangan Umum
7. Kepala Kantor Wilayah Deppen RI Propinsi seluruh Indonesia.
8. Kepala Kantor Departemen Penerangan RI Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.

U N T U K

Menyelenggarakan Pameran Pembangunan dan Hari Proklamasi Kemerdekaan Tingkat Propinsi, Pameran Pembangunan dan Hapsak Pancasila tingkat Kabupaten dan Kotamadya, Pameran Keliling Kecamatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

I. PENGERTIAN UMUM

1. Yang dimaksud dengan Pameran Pembangunan dan Hari Proklamasi Kemerdekaan ialah Pameran Pembangunan tingkat Propinsi yang diselenggarakan oleh Danwil Deppen Propinsi seluruh Indonesia dalam rangka HUT Proklamasi 17 Agustus 1983.
2. Yang dimaksud dengan Pameran Pembangunan dan Hapsak Pancasila ialah Pameran Pembangunan tingkat Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia dalam rangka Hari Peringatan Kesaktian - Pancasila 1 Oktober 1983.
3. Yang dimaksud dengan Pameran Keliling tingkat Kecamatan ialah Pameran Pembangunan yang diselenggarakan oleh Deppen Kabupaten/Kotamadya di wilayah Kecamatan.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pameran dimaksudkan sebagai salah satu sarana penerangan pembangunan sekaligus untuk memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1983 dikalangan masyarakat.
2. Pameran bertujuan untuk ikut-serta mengusahakan terciptanya kondisi dan suasana kemasyarakatan yang mantap untuk turut serta mensukseskan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV.

III. TEMA PAMERAN

" DENGAN MEMASYARAKATKAN HASIL-HASIL SIDANG UMUM MPR 1983 DAN MENSUKSESKAN PANCA KRIDA KABINET PEMBANGUNAN IV KITA TINGKATKAN PELAKSANAAN PELITA III ".

IV. K O O R D I N A S I

1. Direktorat Pameran :

- a. Mengkoordinir dukungan kegiatan pameran semua unsur operasional dilingkungan Departemen Penerangan dan Instansi lainnya serta unsur-unsur masyarakat.
- b. Mempersiapkan petunjuk pelaksanaan pameran yang meliputi bimbingan teknis peragaan Pameran, petunjuk operasional-pameran dan sistim pelaporan pameran.
- c. Memproduksi dan mengirim bahan peragaan pameran (Paket - Pameran) yang materinya beruang lingkup Nasional kesemua

Kanwil dan Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya seluruh Indonesia.

2. Direktorat Penerangan Daerah ; membina dan menyosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Sarasehan/Loka Karya sebagai Komponen Pameran Pembangunan.
3. Direktorat Penerangan Rakyat ; membina dan menyosialisasikan Petunjuk Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat sebagai Komponen Pameran Pembangunan.
4. Direktorat Pembinaan Humas ; mengkoordinasikan kepesertaan Pameran dari instansi-instansi di luar Deppen RI melalui PAKO-HUMAS di tingkat Pusat dan Daerah serta mengusulkan dan Publikasi penyelenggaraan Pameran Pembangunan melalui Media Massa.
5. Direktorat Pelayanan Penerangan Luar Negeri ; menyiapkan materi Pameran khusus tentang wawasan Nusantara untuk pameran pameran dan meliput kegiatan Pameran Pembangunan untuk keperluan penyusunan bahan penerangan luar negeri.
6. Sekretariat Ditjen Penun/Pembina Proyek LOPEN Pusat melaksanakan pengendalian dan evaluasi Pameran Pembangunan.
7. Para Kepala Kanwil Deppen RI seluruh Indonesia ;
 - a. Melaksanakan dan bertanggung-jawab atas penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hari Proklamasi 17 Agustus 1985 di Ibukota wilayah masing-masing, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah setempat serta mengkoordinir dan mengikut-sertakan Unit-unit kerja dilingkungan Departemen Penerangan dalam Panitia tersebut.
 - b. Memberikan pengarahan, bimbingan dan pembinaan penyelenggaraan Pameran Pembangunan dan Hapsak Pancasila yang dilaksanakan di Kabupaten/Kotamadya masing-masing.
8. a. Para Kepala Kantor Deppen Kabupaten/Kotamadya menyelenggarakan Pameran Pembangunan dan Hapsak Pancasila setempat masing-masing, bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dan Instansi Pemerintah setempat serta mengkoordinir dan mengikut-sertakan Unit-unit Kerja dilingkungan Departemen Penerangan dalam Pameran tersebut.
- b. Menyelenggarakan Pameran Kefiling ke kecamatan-kecamatan dengan menggunakan bahan-bahan yang telah dipakai dalam Pameran Hapsak Pancasila.

V MATERI PERAGAAN

Materi Peragaan Pameran terdiri dari :

1. Materi Peragaan Nasional, berupa Paket Pameran yang berisi visualisasi data tentang program-program dan hasil-hasil pembangunan yang beruang lingkup Nasional meliputi :

- a. Kesejarahan ;
 - (1) Poster Kesejarahan 1908
 - (2) Poster Kesejarahan 1928
 - (3) Poster Kesejarahan 1945
 - (4) Poster Kesejarahan 1966
 - (5) Poster Kesejarahan 1983
 - b. Hasil Sidang Umum MPR 1983 & Panca Krida ;
 - (1) Susunan Anggota MPR Hasil Pemilu 1982.
 - (2) Ketetapan MPR 1983.
 - (3) Poster Panca Krida Kabinet Pembangunan IV.
 - (4) Bagan /Foto susunan Kabinet Pembangunan IV.
 - (5) Peta Wawasan Nusantara & Politik Luar Negeri.
 - c. Trilogi Pembangunan dan Devaluasi
Pembangunan Sektoral.
 - d. 8 (delapan) Proyek Inpres.
2. Materi Peragaan Daerah, meliputi program-program dan hasil-hasil pembangunan daerah masing-masing yang berbentuk proyek-proyek PELITA Nasional tingkat Propinsi, Kabupaten dan Kota-madya berdasarkan data dari BAPPEDA setempat.

VI. PESERTA PAMERAN

Untuk meningkatkan terwujudnya sistem penerangan terpadu, pameran agar mengikut-sertakan ;

1. Unit-unit Kerja di lingkungan Departemen Penerangan RI.
2. Pemerintah Daerah dan Instansi-instansi Pemerintah setempat.
3. Perusahaan Negara / Daerah dan Swasta.
4. Organisasi Profesi, masyarakat dan generasi muda.

VII. SARASEHAN / LOKAKARYA

1. Tujuan Sarasehan / Loka Karya ialah meningkatkan usaha penerangan dalam rangka memasyarakatkan hasil-hasil Sidang Umum MPR tahun 1983 dan mensukseskan Panca Krida Kabinet Pembangunan IV.
2. Peserta Sarasehan / Loka Karya terdiri dari ;
 - a. Pemerintah Daerah dan Dinas Vertikal, yang langsung menangani kegiatan pembangunan di daerah.
 - b. Organisasi Profesi
 - c. Pengurus LKMD
 - d. Para Juru Penerang Kecamatan.
3. Penyelenggaraan Sarasehan / Loka Karya berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Direktorat Penerangan Daerah.

VIII. PERTUNJUKAN RAKYAT

1. Pertunjukan Rakyat disamping berfungsi sebagai hiburan bagi para pengunjung pameran, hendaknya juga membawakan pesan sesuai dengan thema Pameran dalam bentuk Pertunjukan Rakyat yang komunikatif.
2. Pelaksanaan Pertunjukan Rakyat berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (JUKLAK) yang disusun oleh Direktorat Pencerahan Rakyat.

IX. LOMBA KRIDA PEMBANGUNAN

1. Kegiatan Lomba Krida dilaksanakan dalam bentuk angket - berhadiah, Lomba Ketrampilan dan Lomba Peragaan antar peserta dan sebagainya yang ada kaitannya dengan thema Pameran maupun Pembangunan.
2. Angket berhadiah diusahakan agar para pengunjung dimotivasi untuk memperhatikan peragaan pameran khususnya Data pembangunan nasional.
3. Lomba Ketrampilan bagi para pemuda/pemudi yang berhubungan dengan daerah setempat, hasil-hasil Sidang Umum MPR - tahun 1983, dan lain sebagainya.
4. Lomba Peragaan antar peserta dimaksudkan untuk mendorong penyajian peragaan pembangunan sebaik-baiknya.

X. WAKTU PENYELENGGARAAN

Waktu penyelenggaraan pameran dengan seluruh kegiatannya disesuaikan dengan penyelenggaraan Peringatan HUT Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1983 dan Hapsak Pancasila 1 Oktober 1983, sekurang-kurangnya 5 hari.

- #### XI. Penyelenggaraan Pameran Keliling
- supaya dikaitkan dengan pemantapan Daerah-daerah terutama Desa-desanya yang telah berhasil membina daerahnya misalnya Desa-desanya yang telah memperoleh Juara dalam lomba desa.

XII. PEMBEAYAAN

1. Biaya penyelenggaraan pameran ini dibebankan kepada DIK & DIP POPEN Th 1983/1984 dengan penggunaan scheidat-hematnya.
2. Masing-masing unit Peserta menyediakan biaya sendiri bagi pelaksanaan teknis peragaan dan kegiatan operasional.

XIII. L A P O R A N

Pelaksanaan Instruksi ini supaya dilaporkan kepada Direktur-Jenderal Pencerangan Umum sesuai dengan petunjuk pelaksanaan

sistim laporan dari Pusat dan dikirim selambat-lambatnya satu minggu setelah pameran ditutup.

XVI. L A I N - L A I N

Hal-hal yang belum diatur dalam Instruksi ini akan diatur - secara khusus dalam bentuk Petunjuk Pelaksanaan.

Instruksi ini^o berlaku mulai tanggal dikeluarkan dan berakhir setelah seluruh laporan pelaksanaan diterima oleh Direktur - Jenderal Penerangan Umum Departemen Penerangan RI.

Dikeluarkan di : J A K A R T A

Pada Tanggal : 2 JULI 1983

DIREKTUR JENDERAL PENERANGAN UMUM

Tembusan : Yth.

1. Bapak Menteri Penerangan RI (sbg. laporan)
2. Bapak Menteri Dalam Negeri RI ()
3. Sdr. Sekjen, Irjen, Ka. Badan Litbang Pen. dan Para Dirjen Dept. Penerangan RI.
4. Para Sekjen Departemen/Instansi Pemerintah Non Departemen.
5. Para Gubernur KDH Tk. I seluruh Indonesia
6. Para Bupati/Walikota KDH Tingkat II seluruh Indonesia.
7. Para Kepala Biro Tata Usaha, Keuangan, Kepegawaian, Hukum Deppen RI.
8. Pangurus BAKOHUMAS

Petikan ; Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

M. Mulya

(DRS. M. GULTOM)

NIP : 050013586.